

Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Diki Ramadandi¹ Sufian Hamim²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia.
e-mail : dikiramadandi@student.uir.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to analyze and explain the implementation of the road construction policy in Muara Basung Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province. The research method used is a descriptive qualitative approach, an approach to explore and understand the meaning that a number of individuals or groups consider to originate from social problems. Informants include the Head of the PUPR Office of Bengkalis Regency, the Head of Muara Basung Village, the Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), the Technical Implementer of Activities (PTK), the Chairperson of the Activity Implementation Team (TPK), the Implementing Contractor, and Community Leaders. Data collection in the study consists of interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used consist of Data Condensation, Data Presentation, and Conclusion Drawing/Verification. Based on the results of the research related to the Implementation of the Road Construction Policy in Muara Basung Village, Pinggir District, Bengkalis Regency, Riau Province, it is known that it has been implemented quite well, but there needs to be an increase and equality of road construction such as on the main village road. Likewise, the low participation of the community in contributing funds and labor.

Keywords: Implementation, Policy, and Road Development.

Abstrak

Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari permasalahan sosial. Informan terdiri Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa Muara Basung, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK), Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kontraktor Pelaksana, dan Tokoh Masyarakat. Pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau diketahui terlaksana dengan cukup baik namun perlu ada peningkatan dan pemerataan pembangunan jalan seperti pada jalan utama desa. Demikian pula dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana dan tenaga.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dan Pembangunan Jalan.

Pendahuluan

Desa Muara Basung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Secara geografis, desa ini memiliki posisi strategis dengan luas wilayah sekitar 2.500 hektar dan berbatasan langsung dengan beberapa desa tetangga seperti Desa Balai Pungut di sebelah Utara, Desa Semunai di sebelah Selatan, Desa Muara Bungkal di sebelah Timur, dan Desa Balai Raja di sebelah Barat. Desa Muara Basung memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor perkebunan, pertanian, dan kehutanan.

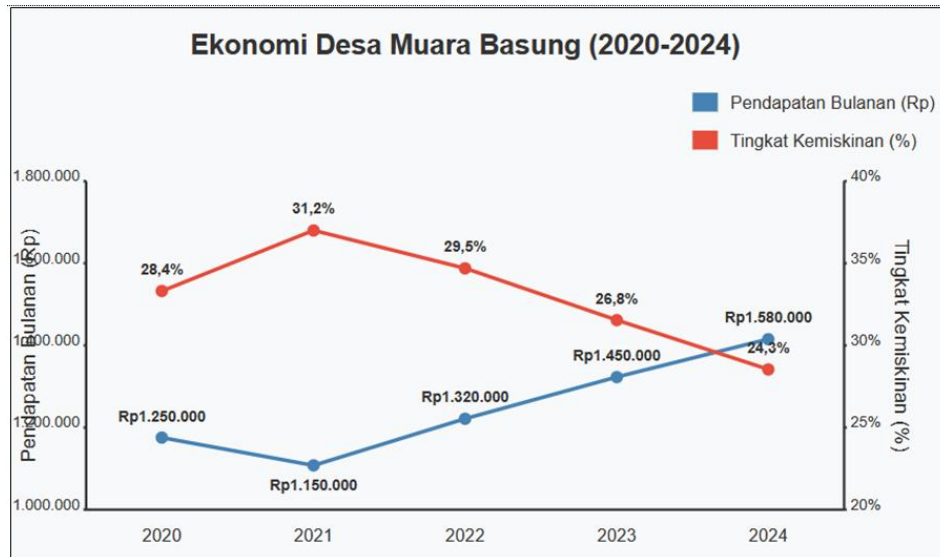
Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2023) sekitar 65% lahan di desa ini dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet yang menjadi komoditas unggulan daerah tersebut. Selain itu, desa ini juga memiliki sumber daya hutan yang masih terjaga dengan baik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Potensi sumber daya alam lainnya adalah adanya aliran sungai yang membentang di sepanjang desa yang dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan perikanan, transportasi air tradisional, dan kebutuhan sehari-hari. Kekayaan alam ini menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi desa, namun pengelolaannya masih belum optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung, terutama akses jalan yang belum memadai.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Muara Basung dalam lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami dinamika yang signifikan dengan berbagai tantangan dan peluang. Pada tahun 2020, pendapatan per kapita masyarakat desa tercatat sekitar Rp1.250.000 per bulan dengan tingkat kemiskinan mencapai 28,4% (BPS Bengkalis, 2020). Memasuki tahun 2021, terjadi penurunan pendapatan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor perkebunan dan pertanian, dengan pendapatan rata-rata turun menjadi Rp1.150.000 per bulan dan tingkat kemiskinan naik menjadi 31,2%.

Menurut data dari Kantor Desa Muara Basung pada tahun 2022 perekonomian mulai menunjukkan pemulihan dengan pendapatan rata-rata meningkat menjadi Rp1.320.000 dan tingkat kemiskinan turun menjadi 29,5%. Tahun 2023 menandai peningkatan ekonomi yang lebih stabil dengan pendapatan mencapai Rp1.450.000 dan tingkat kemiskinan turun ke 26,8% didorong oleh stabilisasi harga komoditas kelapa sawit dan karet.

Data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pendapatan rata-rata masyarakat desa mencapai Rp1.580.000 dengan tingkat kemiskinan turun ke 24,3%. Meskipun terjadi peningkatan ekonomi, ketimpangan ekonomi masih terlihat jelas antara petani kecil dan pemilik lahan besar, dengan koefisien gini mencapai 0,42 pada tahun 2024. Struktur ekonomi desa masih didominasi oleh sektor primer (perkebunan dan pertanian) sekitar 70%, sektor perdagangan 20%, dan sektor jasa 10% mencerminkan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam dan rendahnya diversifikasi ekonomi.

Gambar 1. Ekonomi Desa Muara Basung (2020-2024)



Sumber: BPS Bengkalis, Kantor Desa Muara Basung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bengkalis Koefisien Gini 2024: 0.42 | Struktur Ekonomi: Perkebunan & Pertanian 70%, Perdagangan 20%, Jasa 10%

Berdasarkan data ekonomi Desa Muara Basung tahun 2020-2024, terlihat pola pemulihan ekonomi yang konsisten setelah terjadi penurunan pada masa pandemi COVID-19. Pendapatan per kapita bulanan mengalami penurunan dari Rp1.250.000 pada 2020 menjadi Rp1.150.000 pada 2021, namun kemudian menunjukkan tren peningkatan signifikan hingga mencapai Rp1.580.000 pada 2024. Secara paralel, tingkat kemiskinan yang semula meningkat dari 28,4% menjadi 31,2% pada 2021, kemudian menurun konsisten hingga 24,3% pada 2024. Meskipun terjadi perbaikan ekonomi, ketimpangan masih cukup tinggi dengan koefisien Gini mencapai 0,42 pada 2024. Struktur ekonomi desa masih sangat bergantung pada sektor primer (70%), dengan diversifikasi yang terbatas pada sektor perdagangan (20%) dan jasa (10%), menunjukkan bahwa ekonomi desa masih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas perkebunan dan pertanian.

Sarana dan prasarana di Desa Muara Basung memegang peranan vital dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, namun dalam realitasnya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Desa ini memiliki satu Puskesmas Pembantu dengan tiga tenaga kesehatan yang melayani sekitar 3.500 penduduk, sehingga rasio tenaga kesehatan dengan masyarakat masih jauh dari ideal (Profil Kesehatan Kabupaten Bengkalis, 2023). Pada bidang pendidikan, terdapat dua Sekolah Dasar, satu Sekolah Menengah Pertama, namun belum memiliki Sekolah Menengah Atas, yang mengakibatkan siswa lulusan SMP harus menempuh pendidikan lanjutan di Kecamatan tetangga dengan jarak tempuh sekitar 15-20 kilometer. Fasilitas ibadah di desa ini terdiri dari lima masjid dan tiga musholla yang tersebar di beberapa dusun.

Sarana ekonomi meliputi satu pasar tradisional yang beroperasi dua kali seminggu dan sekitar 35 warung kecil. Fasilitas pemerintahan desa mencakup satu kantor desa, satu balai pertemuan, dan lima pos keamanan lingkungan. Akses terhadap listrik sudah mencapai 85% rumah tangga, meskipun sering terjadi pemadaman bergilir (PLN Rayon Pinggir, 2024). Sementara itu, akses terhadap air bersih masih menjadi kendala dengan hanya 60% rumah

tangga yang memiliki akses ke air bersih dari sumur bor, sedangkan untuk sisanya masih mengandalkan air sungai. Jaringan telekomunikasi juga masih terbatas dengan kualitas sinyal yang tidak stabil di beberapa titik desa. Infrastruktur jalan sebagai sarana penghubung utama masih menjadi permasalahan mendasar dengan kondisi yang belum memadai.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), kondisi sarana dan prasarana Desa Muara Basung, khususnya infrastruktur jalan mengalami perkembangan yang belum signifikan. Berdasarkan data Laporan Kinerja Pemerintah Desa Muara Basung, (2020) pada tahun 2020 total panjang jalan desa mencapai 24,5 kilometer dengan rincian: 5,2 kilometer jalan aspal (21,2%), 8,3 kilometer jalan berbatu atau kerikil (33,9%), dan 11 kilometer jalan tanah (44,9%). Kondisi jalan aspal pun tidak seluruhnya baik dengan sekitar 35% mengalami kerusakan sedang hingga berat. Memasuki tahun 2021, berdasarkan observasi Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Riau, (2021) terjadi peningkatan kerusakan jalan akibat intensitas hujan yang tinggi dan beban kendaraan perkebunan yang overload dengan kondisi jalan aspal yang rusak meningkat menjadi 45%.

Pada tahun 2022, menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis, terdapat penambahan jalan aspal sepanjang 1,2 kilometer, sehingga total jalan aspal menjadi 6,4 kilometer (26,1%), meskipun tingkat kerusakan masih mencapai 40%. Tahun 2023 ditandai dengan adanya program perbaikan jalan yang mengkonversi 2,5 kilometer jalan berbatu menjadi jalan aspal, sehingga total jalan aspal menjadi 8,9 kilometer (36,3%), namun kerusakan jalan lama masih belum tertangani secara menyeluruh. Data terbaru dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Muara Basung (2024) menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, komposisi jalan desa menjadi: 9,7 kilometer jalan aspal (39,6%), 7,5 kilometer jalan berbatu/kerikil (30,6%) dan 7,3 kilometer jalan tanah (29,8%). Masalah utama yang masih dihadapi adalah kondisi jalan yang cepat rusak karena kualitas material yang kurang baik, sistem drainase yang buruk, dan beban kendaraan berat perkebunan yang melebihi kapasitas jalan.

Gambar 2. Perkembangan Infrastruktur Jalan Desa Muara Basung (2020-2024)



Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Desa Muara Basung, Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Riau, Dinas PU Kab. Bengkalis, Musrenbang Desa

Berdasarkan data infrastruktur jalan di Desa Muara Basung tahun 2020-2024, terjadi peningkatan bertahap dalam kualitas infrastruktur jalan dengan pertambahan signifikan pada jalan beraspal dari 5,2 km (21,2%) pada 2020 menjadi 9,7 km (39,6%) pada 2024. Secara paralel,

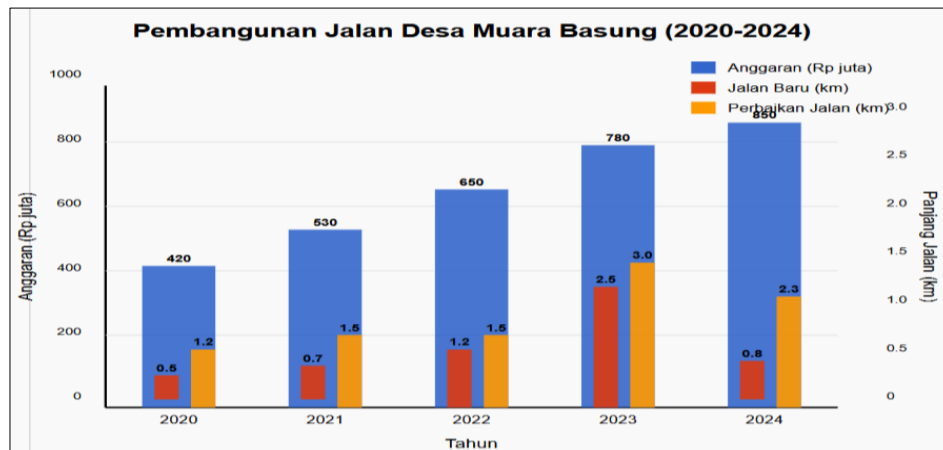
jalan tanah yang semula mendominasi dengan 11 km (44,9%) berkurang menjadi 7,3 km (29,8%) di 2024, menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas infrastruktur. Meskipun demikian, masalah kerusakan jalan aspal masih konsisten tinggi dengan tingkat kerusakan 35% pada 2020, memuncak di 45% pada 2021, dan kemudian relatif stabil di sekitar 40% hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah jalan aspal bertambah, kualitas dan pemeliharaan masih menjadi kendala serius. Permasalahan utama meliputi kualitas material yang kurang baik, sistem drainase yang buruk, dan beban kendaraan berat perkebunan yang melebihi kapasitas jalan, sehingga menghambat efektivitas program pembangunan infrastruktur jalan di desa tersebut.

Pembangunan jalan di Desa Muara Basung selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan adanya upaya peningkatan meski belum optimal. Pada tahun, 2020 berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Desa Muara Basung, alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan mencapai Rp420 juta dengan realisasi pembuatan jalan beton sepanjang 0,5 kilometer di pusat desa dan perbaikan jalan berbatu sepanjang 1,2 kilometer. Analisis kondisi jalan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis (2020) menunjukkan bahwa 65% jalan desa berada dalam kondisi yang membutuhkan perbaikan segera. Memasuki tahun, 2021 anggaran pembangunan jalan meningkat menjadi Rp530 juta dengan realisasi pembangunan jalan aspal sepanjang 0,7 kilometer dan peningkatan status 1,5 kilometer jalan tanah menjadi jalan berbatu. Menurut dokumentasi Tim Pengawas Pembangunan Desa (2021), dari total 6,4 kilometer jalan aspal yang ada, 2,8 kilometer di antaranya mengalami kerusakan sedang hingga berat yang mengganggu mobilitas warga.

Pada tahun 2022, dengan anggaran Rp650 juta, dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 1,2 kilometer dan perbaikan jalan rusak sepanjang 1,5 kilometer. Berdasarkan Laporan Evaluasi Pembangunan Desa, (2022) meski ada peningkatan kuantitas jalan beraspal, kualitas konstruksi masih belum memenuhi standar sehingga cepat rusak terutama saat musim hujan. Tahun 2023 ditandai dengan adanya alokasi anggaran sebesar Rp780 juta untuk pengaspalan 2,5 kilometer jalan dan perbaikan drainase sepanjang 3 kilometer. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh LPPM Universitas Islam Riau, (2023) menunjukkan bahwa 68% warga masih tidak puas dengan kondisi jalan desa. Terakhir, pada tahun 2024, dengan anggaran Rp850 juta, dilakukan pengaspalan 0,8 kilometer jalan baru dan pemeliharaan 2,3 kilometer jalan eksisting. Data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (2024) menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kuantitas jalan beraspal menjadi 9,7 kilometer, sekitar 35% di antaranya masih dalam kondisi rusak yang membutuhkan perbaikan.

Pembangunan jalan di Desa Muara Basung menunjukkan tren peningkatan anggaran yang konsisten dari Rp420 juta pada tahun 2020 menjadi Rp850 juta pada tahun 2024. Volume pembangunan jalan baru mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 2,5 kilometer jalan baru, namun menurun signifikan menjadi hanya 0,8 kilometer pada tahun 2024. Sementara itu, aktivitas perbaikan jalan meningkat secara signifikan pada tahun 2023 dengan 3 kilometer jalan yang diperbaiki, sebelum menurun menjadi 2,3 kilometer pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan kuantitas jalan beraspal, permasalahan kualitas konstruksi masih menjadi kendala utama, dengan 35% jalan masih dalam kondisi rusak pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran belum berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di desa tersebut.

Gambar 3. Pembangunan Jalan Desa Muara Basung (2020-2024)



Sumber: Laporan Penggunaan Dana Desa Muara Basung

Regulasi pembangunan jalan desa, termasuk di Desa Muara Basung, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama yang memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengelola pembangunan infrastrukturnya secara mandiri, termasuk jalan desa. Pasal 78 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Secara lebih spesifik, pembangunan jalan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang mengklasifikasikan jalan desa sebagai aset desa yang pembangunan dan juga pemeliharannya menjadi kewenangan pemerintah desa. Menurut Suryanto, (2020) implementasi peraturan ini di Desa Muara Basung masih belum maksimal karena keterbatasan kapasitas teknis pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (yang kemudian diperbarui setiap tahun) juga menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan desa termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Desa yang mengatur standar teknis pembangunan jalan desa sesuai dengan karakteristik geografis Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan kajian Hamdani, (2023) meskipun kerangka regulasi telah memadai, implementasinya di Desa Muara Basung masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kapasitas SDM, terbatasnya dukungan teknis, dan lemahnya pengawasan.

Perkembangan otonomi dalam pembangunan jalan desa selama lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami dinamika yang signifikan, terutama dalam aspek pengelolaan anggaran dan kewenangan teknis. Pada tahun 2020, berdasarkan analisis kebijakan yang dilakukan oleh Anwar, (2020) kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan jalan masih terbatas pada perencanaan penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek teknis seperti desain rekayasa dan standar kualitas masih ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Menurut

data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2021), pada tahun 2021 terjadi penguatan otonomi desa melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan desa, dengan porsi minimal 40% dari total Dana Desa dan di Desa Muara Basung, implementasi kebijakan ini meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dari 35% menjadi 43% dari total Dana Desa yang diterima.

Memasuki tahun 2022, otonomi desa dalam pembangunan jalan semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menentukan prioritas ruas jalan yang akan dibangun berdasarkan hasil musyawarah desa. Studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Riau, (2022) menunjukkan bahwa peningkatan otonomi ini berdampak positif pada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan jalan di Desa Muara Basung dengan tingkat partisipasi mencapai 65% dalam musyawarah desa. Pada tahun 2023, kewenangan teknis pemerintah desa dalam pembangunan jalan semakin diperluas melalui program pendampingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis yang melatih 12 kader teknik desa untuk mampu melakukan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan secara mandiri. Hingga tahun 2024, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, (2024) otonomi pemerintah Desa Muara Basung dalam pembangunan jalan telah mencapai 75% dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, meskipun masih terkendala pada aspek standarisasi teknis dan penjaminan kualitas.

Implementasi pembangunan jalan di Desa Muara Basung selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan studi evaluasi yang dilakukan oleh Rahman, (2020) yaitu pada tahun 2020 dari total rencana pembangunan jalan sepanjang 2,5 kilometer, hanya terealisasi 1,7 kilometer (68%) dengan kualitas yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Faktor utama yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran, kapasitas teknis tim pelaksana, dan kondisi cuaca yang tidak mendukung selama masa konstruksi dan pada tahun 2021, implementasi pembangunan jalan mengalami peningkatan dengan tingkat realisasi mencapai 78% dari rencana, meskipun dari segi kualitas masih belum optimal karena menggunakan material yang kurang baik untuk menghemat biaya (Laporan Pengawasan Infrastruktur Desa, 2021). Proses pengadaan material dan kontraktor pelaksana juga masih belum transparan, sebagaimana diungkapkan Hidayat, (2022) bahwa 45% proyek pembangunan jalan di Desa Muara Basung tidak melalui mekanisme tender yang kompetitif.

Tahun 2022, implementasi pembangunan jalan mulai menunjukkan perbaikan dengan tingkat realisasi mencapai 85% dan peningkatan kualitas konstruksi melalui pendampingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten. Hal ini didukung oleh penguatan kapasitas 8 orang staf teknis desa melalui pelatihan manajemen proyek infrastruktur desa yang diselenggarakan oleh Kemendesa PDTT (Tim Pendamping Desa, 2022). Pada tahun 2023, implementasi pembangunan jalan semakin baik dengan tingkat realisasi mencapai 92% dari rencana, didukung oleh peningkatan alokasi anggaran dan sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat yang melibatkan forum warga dalam setiap tahapan pembangunan. Terakhir, pada tahun 2024, implementasi pembangunan jalan di Desa Muara Basung mencapai tingkat realisasi 95% dengan peningkatan kualitas teknis yang signifikan berkat pendampingan intensif dari tim ahli, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek

pemeliharaan pasca-konstruksi yang belum memiliki mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan (Laporan Evaluasi Pembangunan Desa, 2024).

Kondisi infrastruktur jalan di Desa Muara Basung menunjukkan peningkatan kuantitas namun belum optimal dari segi kualitas, dengan proporsi jalan beraspal yang meningkat dari 21,2% menjadi 39,6% dalam lima tahun terakhir, meskipun 35% di antaranya masih dalam kondisi rusak. Implementasi pembangunan jalan di desa tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh faktor anggaran, kapasitas teknis sumber daya manusia, kualitas pengawasan, dan tingkat partisipasi masyarakat. Kebijakan otonomi desa dalam pembangunan jalan telah menunjukkan dampak positif dengan meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan jalan secara mandiri, namun masih terkendala pada aspek standarisasi teknis dan penjaminan kualitas. Strategi yang dapat diterapkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan jalan meliputi penguatan kapasitas teknis aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, optimalisasi penggunaan Dana Desa, dan pengembangan mekanisme pemeliharaan jalan yang berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini terkait dengan judul "Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau".

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut The Liang Gie (1999: 14) administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut George J. Gordon dalam Syafie (2006) Proses lengkap di mana organisasi dan individu berurusan dengan penerapan atau implementasi hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat disimpulkan sebagai administrasi publik.

Menurut Harbani Pasolong (2010:8) administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.

Konsep Organisasi

Sedangkan menurut Siagian (2007:6), organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Konsep Manajemen Publik

George R. Terry dalam Winardi (2000:4) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

Konsep dan Teori Pembangunan infrastruktur Desa

Teori pembangunan infrastruktur merupakan landasan konseptual yang esensial dalam memahami pembangunan wilayah pedesaan secara holistik. Infrastruktur, sebagai kerangka fisik yang mendukung berbagai aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, memiliki peran strategis dalam transformasi wilayah pedesaan. Menurut Todaro & Smith, (2021) pembangunan infrastruktur berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang dapat membuka akses terhadap pasar, layanan dasar, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat perdesaan. Sementara itu, Hirschman dalam teori pertumbuhan tidak seimbang (*unbalanced growth*) menekankan bahwa investasi infrastruktur dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Warsilan & Noor, (2023) menunjukkan korelasi signifikan antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam aspek mobilitas sosial, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta diversifikasi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur juga mencerminkan paradigma pembangunan spasial yang menekankan keseimbangan antarwilayah sebagaimana dikemukakan oleh Rustiadi et al., (2022) yang mengartikulasikan pentingnya integrasi spasial untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan.

Konsep dan Teori Kebijakan Pembangunan Jalan Desa

Implementasi pembangunan jalan desa merupakan tahapan krusial yang mentransformasikan kebijakan dan perencanaan menjadi aksi konkret di lapangan. Proses implementasi ini mencakup aspek teknis konstruksi, manajemen sumber daya, koordinasi multipihak, hingga adaptasi terhadap konteks lokal yang bervariasi. Ahmadi & Widodo, (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi pembangunan jalan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan partisipatif yang melibatkan stakeholders lokal dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dampak. Suryanto et al., (2022) mengungkapkan variasi pola implementasi yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis, kapasitas pemerintah desa, dan dinamika sosial masyarakat setempat. Studi tersebut juga mengidentifikasi inovasi-inovasi lokal dalam implementasi, seperti sistem gotong royong terstruktur dan mekanisme pengawasan berbasis komunitas yang meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan.

Konsep dan Teori Implementasi

Keberhasilan implementasi pembangunan jalan desa dipengaruhi oleh multifaktor yang saling berinteraksi dalam konteks yang kompleks. Analisis komprehensif oleh Hidayat & Sulisty, (2022) mengidentifikasi tiga kategori faktor determinan: institusional, sosio-kultural, dan teknis-operasional. Dari dimensi institusional, kapasitas pemerintah desa dalam mengelola proyek, transparansi penggunaan anggaran, dan sinergitas antarlembaga merupakan variabel kunci yang menentukan efektivitas implementasi. Studi longitudinal oleh Puspasari et al., (2023) menunjukkan bahwa desa-desa dengan tata kelola yang baik (*good village governance*) cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan pembangunan infrastruktur termasuk jalan desa.

Teori Pembangunan Desa Terpadu

Konsep Pembangunan Desa Terpadu (*Integrated Rural Development*) yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan infrastruktur perdesaan. Sufian Hamim (2023) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa harus dipandang sebagai suatu sistem terpadu yang mencakup dimensi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Teori Manajemen Pembangunan Desa

Manajemen pembangunan desa yang efektif mencakup empat fungsi utama: perencanaan strategis berbasis evidence, pengorganisasian sumber daya yang efisien, implementasi yang adaptif, serta monitoring dan evaluasi yang partisipatif (Sufian Hamim, 2022). Sufian Hamim (2022) menekankan bahwa dalam konteks pembangunan jalan desa, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapasitas manajerial pemerintah desa dan dukungan sistematis dari level pemerintahan yang lebih tinggi.

Teori Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan

Dari berbagai konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli memberikan pengertian bahwa pembangunan sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, politik, sosial ekonomi, social budaya dan ketahanan masyarakat. Demikian pula dalam kerangka acuan pembangunan nasional, pembangunan yang memberdayakan masyarakat di perdesaan harus menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama. Membangun masyarakat perdesaan berarti pula membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Selain memiliki potensi sumber daya manusia, perdesaan juga memiliki potensi sumber daya alam (Sufian Hamim, 2024).

Teori Pembangunan Perdesaan di Indonesia

Menurut Sufian Hamim, (2024) dewasa ini pemerintahan Desa di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 94 menetapkan bahwa di Desa dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Pasal 95 ayat 1 menetapkan pula bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa. Selanjutnya pasal 99 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan kewenangan Desa mencakup : kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa; kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten. Kemudian dari pada itu pasal 100 menetapkan pula bahwa tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan mampu

mengeksplorasi secara mendalam fenomena implementasi pembangunan infrastruktur di tingkat desa, khususnya dari perspektif para pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Menurut Creswell & Poth, (2023) penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan, data hasil penelitian diperoleh secara langsung, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan berupa foto-foto, rekaman audio, dan catatan lapangan sehingga peneliti mendapat jawaban apa adanya dari responden.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi Pembangunan Jalan Desa Muara Basung

Menurut Edwards dalam Leo (2008: 149) implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tentang cara komunikasi antara pemerintah dengan pelaksana pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan cara informasi program pembangunan jalan ini disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan desa, termasuk kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan kepala desa, untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

Salah satu ketersediaan infrastruktur yang baik membawa dampak yang baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat kemudian sebaliknya apabila infrastruktur buruk maka kemungkinan akan berdampak buruk terhadap masyarakat seperti aktivitas petani masyarakat akan terganggu untuk membawa hasil panen, aktivitas pendidikan siswa yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar untuk pergi ke sekolah terganggu dan banyak menguras waktu sehingga siswa tersebut lambat dan bisa saja siswa enggan atau malas untuk belajar di karenakan faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian aktivitas bagi pengendara dapat berdampak rawan terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan buruk, dan berdampak pula terhadap perekonomian masyarakat (Mustafa, 2017: 73).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang cara komunikasi antara atasan dan bawahan dalam pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan melakukan Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan dalam pembangunan jalan desa sangat penting untuk kelancaran proyek. Komunikasi yang baik memastikan semua orang memahami tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka, serta meminimalkan potensi kesalahan dan kesalahpahaman.

Tabel 1. Program Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Muara Basung
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Volume / Satuan	Waktu	Biaya	
				Jumlah (Rp)	Sumber Biaya
I	Sub. Bidang Pendidikan				
1	Pengelolaan Perpustakaan milik Desa	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 24.000.000	ADD
2	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 53.580.000	ADD
3	Insentif Guru Tahfiz	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 12.000.000	PBP
4	Pengadaan Fasilitas Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa (Buku, Rak Karpet, Kursi)	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 12.000.000	PBP
5	Fasilitasi Ruang Publik Terbuka di Desa/Taman, Gazebo/Tempat berteduh di ruang terbuka	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 6.500.000	PBP
6	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah h Non Formal Milik Desa	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 130.500.000	DDS
7	Pendidikan Keagamaan Rutin bagi Remaja Desa (Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masy	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 10.000.000	Bermasa
8	Rehap Gedung MDTA Al-Azmi	1 Kegiatan	3 Bln	Rp 20.000.000	PBH
9	Rehap Gedung TPA Wali Seno	1 Kegiatan	3 Bln	Rp 20.000.000	PBH
10	Pengadaan KWH Meteran TK Pembina Kecamatan Pinggir	1 Kegiatan	1 Bln	Rp 4.000.000	PBH
II	Sub. Kesehatan				
1	Penyelenggaraan Poslansia (Makanan Tambahan, Insentif Kader Poslansia)	1 Kegiatan	1 Bln	Rp 12.000.000	ADD
2	Bantuan Operasional Posyandu (Seragam, Makan Minum Rapat, Kegiatan Posyandu/Stunting)	1 Kegiatan	1 Bln	Rp 12.000.000	PBP
3	Penanganan Stunting, Penaggulangan Kemiskinan Exstrim Di Desa	1 Kegiatan	1 Bln	Rp 20.000.000	PBP
4	Insentif KPM	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 12.000.000	DDS

No	Program Kegiatan	Volume / Satuan	Waktu	Biaya	
				Jumlah (Rp)	Sumber Biaya
5	Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Insentif Kader Posyandu, Operasional)	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 150.000.000	DDS
6	Pengadaan Perlengkapan Posyandu	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 20.000.000	DDS
7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (PPKM)	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 21.500.000	DDS
8	Penanganan stunting (Desa siaga kesehatan)	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 10.000.000	Bermasa
9	Pembangunan Gedung Posyandu Kasih Ibu	1 Kegiatan	3 Bln	Rp 71.445.830	DDS
10	Rehap Polindes RT.003.RW.006 Dusun II Sialang Rimbun	1 Kegiatan	3 Bln	Rp 20.000.000	DDS
11	Pengadaan mobileur dan Perlengkapan Posyandu	1 Kegiatan	1 Bln	Rp 10.000.000	DDS
12	Pengadaan Mobileur Posyandu Cempaka Dusun II Sialang Rimbun	1 Kegiatan	1 Bln	Rp 10.000.000	DDS
III Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
1	Publikasi hasil Pembangunan (Kerjasama Dengan Jurnalis)	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 10.000.000	Bermasa
IV Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Foster, baleho dll)	1 Kegiatan	12 Bln	Rp 37.000.000	ADD
2	Pembuatan Peta Potensi Rawan Bencana dan Pembuatan Jalur Evakuasi Bencana Desa	1 Kegiatan	1 Bln	Rp 3.000.000	PBP
3	Peningkatan Jalan Sei Sikai RT.006.RW.001	1 Kegiatan	3 Bln	Rp 200.000.000	Bermasa
4	Peningkatan Jalan Desa Muara Basung	1 Kegiatan	3 Bln	Rp 100.000.000	Bermasa
V Sub Bidang Kawasan Pemukiman					
1	- Rehap rumah layak huni	10 Unit	6 Bln	Rp 200.000.000	Bermasa
2	Pembuatan Sumur Bor 7 Unit	7 Unit	3 Bln	Rp 94.783.225	PBH
Jumlah		Rp 1.306.309.055			

Sumber : Kantor Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Dari tabel di atas diketahui bahwa pembangunan Desa Muara Basung, yang terletak di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau, difokuskan pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Desa ini telah melaksanakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Daftar Usulan RKPDDes.

Beberapa program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan di Desa Muara Basung meliputi:

- 1) Infrastruktur
Peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan optimalisasi drainase.
- 2) Pendidikan
Pembangunan gedung sekolah.
- 3) Kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), rehab Puskesmas.
- 4) Pertanian
Bantuan bibit tanaman dan hewan ternak.

Selain itu, Desa Muara Basung juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai program yang melibatkan Sumber Daya Manusia, industri, pendidikan, dan pertanian. Pemerintah desa juga menekankan pentingnya musrenbangdes dalam menyusun rencana pembangunan yang menjadi prioritas dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sumberdaya Pembangunan Jalan Desa Muara Basung

Menurut Edwards dalam Leo (2008: 149) fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang keahlian para pelaksana dalam pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yaitu perlu beberapa persyaratan keahlian dan kualifikasi tim pelaksana yang dibutuhkan seperti kemampuan manajemen proyek, komunikasi, dan kerjasama.

Tantangan utama dalam pembangunan jalan di pedesaan sering kali berasal dari keterbatasan anggaran dan koordinasi yang buruk di antara berbagai instansi pemerintah. Proses perencanaan yang tidak memadai dan alokasi dana yang kurang sering menyebabkan proyek pembangunan jalan terhenti sebelum selesai atau tidak memberikan manfaat jangka panjang yang optimal. Selain itu, kurangnya pemeliharaan pasca-konstruksi yang memadai sering kali mempercepat kerusakan jalan, melebihi perkiraan awal untuk mengatasi kendala-kendala ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk perencanaan yang matang, pendanaan yang andal dan berkelanjutan, serta mekanisme koordinasi dan pemeliharaan yang kuat di antara berbagai entitas pemerintah yang bertanggung jawab atas pembangunan pedesaan. Hanya dengan begitu jaringan jalan pedesaan dapat dibangun dan dipelihara secara optimal, sehingga benar-benar membuka potensi ekonomi di wilayah-wilayah tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Rika Andriati Sukma Dewi, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tentang fasilitas dan sumber-sumber pendukung dalam pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dari pembangunan jalan di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, memerlukan fasilitas dan sumber daya pendukung yang memadai. Fasilitas yang diperlukan meliputi peralatan konstruksi, material bangunan seperti aspal, batu split, pasir, dan semen, serta tenaga kerja terampil. Sumber daya pendukung mencakup

anggaran, perencanaan yang matang, dukungan dari pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat.

Disposisi atau Sikap Pembangunan Jalan Desa Muara Basung

Menurut Edwards dalam Leo (2008: 149) dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang bentuk penerimaan atau penolakan pelaksanaan dalam pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau bisa bentuk penerimaan atau penolakan pelaksanaan pembangunan jalan desa dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta dampak positif dan negatif yang dirasakan. Penerimaan biasanya ditandai dengan partisipasi aktif dalam perencanaan, gotong royong dalam pelaksanaan, dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Penolakan, di sisi lain, bisa muncul karena ketidakpuasan terhadap proses perencanaan, kurangnya manfaat yang dirasakan, atau dampak negatif yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil wawancara tentang bentuk intensitas respon penerimaan atau penolakan dalam pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau bentuk intensitas respon penerimaan atau penolakan dalam pembangunan jalan desa dapat bervariasi, mulai dari penerimaan penuh dengan antusiasme hingga penolakan total dengan berbagai alasan. Respon ini bisa bersifat individual maupun kolektif, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dampak positif dan negatif yang dirasakan, tingkat sosialisasi, serta kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Struktur Birokrasi Pembangunan Jalan Desa Muara Basung

Menurut Edwards dalam Leo (2008: 149) Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas tentang bentuk sumber-sumber politik dalam pembangunan jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sumber-sumber politik dalam pembangunan jalan desa umumnya berasal dari kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dukungan dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengelola dana dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program infrastruktur desa, termasuk pembangunan jalan.

Berikut beberapa proyek pekerjaan pembangunan jalan Desa Muara Basung yaitu:

Tabel 2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Muara Basung Tahun 2024

No	Pekerjaan	Lokasi	Sumber Dana
1	Base pangkal kulim	Desa Muara Basung	Dana Desa
2	Peningkatan jalan abdul kasim	Desa Muara Basung	Dana Desa
3	Peningkatan jalan Kh Husein	Desa Muara Basung	Dana Desa

Sumber: Kantor Desa Muara Basung

Meskipun telah terdapat beberapa proyek pekerjaan pembangunan jalan di Desa Muara Basung, tetap masih terdapatnya jalan utama yang masih tidak layak sebagaimana gambar berikut:

Gambar 4. Kondisi Jalan Desa Muara Basung yang Tidak Layak



Sumber : Dokumen Pribadi

Gambar 5. Kondisi Jalan Desa Muara Basung yang Sudah Layak



Sumber : Dokumen Pribadi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau diketahui terlaksana dengan cukup baik namun perlu ada peningkatan dan pemerataan pembangunan jalan seperti pada jalan utama desa. Demikian pula dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana dan tenaga.

Daftar Pustaka

- Afifudin, H., & Saebani, B. A. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif (3rd Ed.). Cv Pustaka Setia.
- Ahmadi, R., & Widodo, S. (2023). Efektivitas Perencanaan Partisipatif dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan: Studi di Kabupaten Malang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 34(2), 125-142.
- Anwar, R. K. (2022). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Era Digital. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 112-127.
- Anwar, S. (2022). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Arifin, S., & Rachman, F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2), 78-92.
- Arikunto, S. (2023). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (6th Ed.). Rineka Cipta.
- Bryson, J. M. (1991). *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Chaidir, E. Hamim, S., & Fahmi, S. (2009). Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), 1-135.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th Ed.). Sage Publications.
- Edwards Iii, G. C. (2021). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Edwards III, G. C. (2021). *Implementing Public Policy: Challenges and Opportunities in the Modern Era*. *Policy Studies Journal*, 49(1), 71-90.
- Hamdani, R. (2023). Analisis Implementasi Regulasi Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(3), 215-232.
- Harbani Pasolong. (2010). *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Haryanto, T. & Purnomo, S. (2023). *Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- Hasibuan, Malayu Sp. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempatbelas, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara,. Jakarta.
- Herdi Salioso (2023). *Ekonomi Kelembagaan Dan Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Herdiansyah, H. (2023). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (3rd Ed.). Rajawali Pers.
- Herman. (2023). *Governance Dan Pembangunan Lokal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hermawan, R. (2022). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa: Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(1), 110-125.
- Hermawan, R. (2022). *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, A. & Sulisty, H. (2022). Determinan Keberhasilan Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 18(2), 145-162.
- Hidayat, M. (2022). Transparansi Pengadaan dalam Proyek Infrastruktur Desa: Studi Kasus di Kecamatan Pinggir. *Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 78-95.
- Keban, Y.T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori. Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kurniawan, A. & Handayani, W. (2024). Pendekatan Adaptif dalam Manajemen Proyek Pembangunan Jalan Desa. *Jurnal Manajemen Konstruksi*, 19(1), 67-83.
- Kurniawan, T. (2022). *Pengelolaan Keuangan Desa: Transparansi Dan Akuntabilitas*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, T., Novita, D., & Suhardi, M. (2024). Analisis Implementasi Program Pembangunan Jalan Desa Melalui Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 78-93.
- Leo, Agustino. (2008). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua,. Alfabeta, Bandung

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2022). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (5th Ed.). Sage Publications.
- Mustafa. 2017. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 6, No. 3 (2017). Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neuman, W. L. (2023). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approaches* (9th Ed.). Pearson Education Limited.
- Nugraha, A. (2023). Model Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Desa Berbasis Masyarakat. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 8(1), 34-47.
- Nugroho, P., Widyastuti, S., & Permana, A. (2024). Model Kebijakan Infrastruktur Berbasis Kearifan Lokal: Studi Multi-Situs di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 23-37.
- Nurhayati, S., Santoso, B., & Wijaya, K. (2023). Dimensi Politik Pembangunan Jalan Desa: Analisis Relasi Kekuasaan dan Kontestasi Elit Lokal. *Jurnal Politik Lokal*, 6(1), 67-83.
- Prasetyo, R.A., & Firdaus, Y. (2022). Evolusi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 26(1), 57-75.
- Pratama, I., Supriadi, A., & Wijaya, H. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Desa: Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 112-129.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Gava Media.
- Puspasari, D.A., Hermawan, R., & Kusumadewi, S. (2023). Good Village Governance dan Implementasi Pembangunan Infrastruktur: Studi Longitudinal di Desa-desa Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 6(2), 112-130.
- Raco, J. R. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (2nd Ed.). Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahman, F. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa: Studi Kasus di Kecamatan Pinggir. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(1), 45-63.
- Rahmawati, D., & Juhadi, J. (2023). Dampak Ekonomi Pembangunan Jalan Desa: Analisis Ekonometrik Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 76-94.
- Rahmawati, D., Susanto, E., & Fadillah, A. (2024). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Berkelanjutan: Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan di Kabupaten Kampar. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 9(1), 57-72.
- Rika Andriati Sukma Dewi. 2024. Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Agrimansion*, Vol.25 No 2, Agustus 2024. Universitas Mataram
- Rustiadi, E., Pravitasari, A.E., & Setiawan, Y. (2022). Paradigma Pembangunan Spasial Berkelanjutan: Mengurangi Kesenjangan Desa-Kota melalui Infrastruktur yang Inklusif. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 33(1), 12-29.
- Santoso, B., Widodo, A., & Purnama, R. (2024). Dampak Ekonomi Pembangunan Jalan Desa: Studi Komparatif di Tiga Provinsi. *Jurnal Ekonomi Regional*, 19(1), 45-62.
- Shafritz & Hyde, (1987). *Classics Of Organization Theory*. Brooks Cole Publishing Company, Pacific Grove, California.
- Siagian, Sondang. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Pt. Bumi Aksara

- Siswanto. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, S. (2022). *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Stephen P. Robbins (2006). *Perilaku Organisasi*. Erlangga, Jakarta. Sekaran
- Stephen P. Robbins. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain Dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya. Jakarta: Arcan
- Stephen P. Robbins.(2016). *Manajemen*, Jilid 1 Edisi 13, Alih. Bahasa: Bob Sabran Dan Devri Bardani P, Erlangga, Jakarta
- Sufian Hamim (2023). *Pembangunan Desa Berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sufian Hamim (2024). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Purbalingga. Cv. Eureka Media Aksara.
- Sufian Hamim. (2022). *Manajemen Pembangunan Desa Dalam Era Otonomi Daerah*. Pekanbaru: Uir Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (4th Ed.)*. Alfabeta.
- Suryanto, A. (2020). Efektivitas Implementasi UU Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 85-102.
- Suryanto, A., Handoko, W., & Wibisono, S. (2022). Variasi Pola Implementasi Pembangunan Jalan Desa: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 10(2), 112-129.
- Susanto, H. (2023). Indikator Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Desa: Kerangka Evaluasi Komprehensif. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 19(1), 34-49.
- The Liang Gie. (1999). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2021). *Economic Development (13th Edition)*. Pearson.
- Warsilan, & Noor, A. (2023). Korelasi Pembangunan Infrastruktur dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Analisis Data Panel Desa-desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 56-74.
- Wibowo, A., & Hartatik, S. (2024). Dampak Ekologis Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kawasan Pedesaan: Analisis Perubahan Pola Penggunaan Lahan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 112-129.
- Wibowo, A., & Nugroho, P. (2023). Inovasi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Desa dengan Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Teknik dan Infrastruktur*, 9(1), 12-28.
- Widodo, S., Hastuti, P., & Fajarwati, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Pembangunan Jalan Desa: Model Co-Production dalam Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(2), 234-251.
- Winardi. 2000. *Manajemen Pemasaran Modern Dan Perilaku. Konsumen*. Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2022
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Infrastruktur Desa
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Desa

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa